



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SURABAYA

NOMOR W.15.IMI.IMI.1-3252-1-PW.01.01 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBK/WBBM)
KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI TAHUN 2019

KEPALA KANTOR IMIGRASI,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) yang selanjutnya disebut Zona Integritas di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, perlu membentuk Tim Penyusunan dan Pembahasan Data Dukung 6 (enam) Area Perubahan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya;
 - b. bahwa pejabat/pegawai yang tercantum dalam keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas penyusunan dan pembahasan dokumen data dukung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya tentang Tim Penyusunan dan Pembahasan Data Dukung 6 (enam) Area Perubahan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
7. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);
14. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.OT.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBK/WBBM) KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI TAHUN 2019.
- KESATU : Merubah Tim Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Area Perubahan sebagaimana diktum kesatu adalah:
- Membuat rencana kegiatan penyusunan data dukung;
 - Menyiapkan bahan rapat penyusunan data dukung;
 - Mengkompilasi dokumen data dukung;
 - Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Kantor.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.



Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 20 Juni 2019
Kepala Kantor Imigrasi,

Barlian
NIP. 19600209 198403 1 002

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Lampiran I Keputusan Kepala Kantor
 Nomor : W.15.IMI.IMI.1-3252-1-1-PW.01.01 Tahun 2019
 Tanggal : 20 Juni 2019

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI
 SURABAYA PERUBAHAN ATAS TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
 WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
 MELAYANI (WBK/WBBM) KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI TAHUN 2019**

SUSUNAN TIM

1. Pembina : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur
2. Ketua : Kepala Kantor
3. Sekretaris : Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum;
4. Anggota :
 - A. Bidang Manajemen Perubahan
 - Koordinator : Kepala Bagian Tata Usaha
 - Anggota : Kepala Subbagian Keuangan
Dwi Oktavia Purwanti
Yofi Dewa Kurniasari
Tri Indah Handayani
 - B. Bidang Penataan Tata Laksana
 - Koordinator : Kepala Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi
 - Anggota : Kepala Seksi Pemeriksaan I
Kepala Seksi Pemeriksaan II
Kepala Seksi Pemeriksaan III
Kepala Seksi Pemeriksaan IV
Dinar Fitria Rushadi
Hanisyah Dauti Ichromi
 - C. Bidang Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia
 - Koordinator : Kepala Bagian Tata Usaha
 - Anggota : Novita Rahmawati Hidayat
Angga Rahadi Saputra
Anggari Budiarti
Yusfia Anggraini Haq
 - D. Bidang Penguatan Akuntabilitas
 - Koordinator : Kepala Bidang Dokumen Perjalanan dan Izin Tinggal Keimigrasian
 - Anggota : Kepala Seksi Dokumen Perjalanan Keimigrasian
Kepala Seksi Izin Tinggal Keimigrasian
Sarah Maulida
Givanda Eka Hapsari
 - E. Bidang Penguatan Pengawasan
 - Koordinator : Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian
 - Anggota : Kepala Seksi Intelijen Keimigrasian
Kepala Seksi Penindakan Keimigrasian
Desinta Wahyu Kusumawardani
Putri Wijayanti
 - F. Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 - Koordinator : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Keimigrasian

Anggota : Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian
 Kepala Seksi Teknologi Informasi Keimigrasian
 Mirwan Azhar Fahrudi
 Aang Samsudy
 Atika Faradina Randa
 Dyah Retnani Sulistyaningrum

G. Bidang Persepsi Korupsi

Koordinator : Kepala Bidang Dokumen Perjalanan dan Izin Tinggal Keimigrasian

Anggota : Kepala Seksi Dokumen Perjalanan Keimigrasian
 Kepala Seksi Pemeriksaan III
 Kepala Seksi Penindakan Keimigrasian
 Kepala Seksi Teknologi Informasi Keimigrasian
 Arinda Risky Pramudita
 M. Ridhouddin Yunus
 Rizal Rahmat Darmawan

H. Bidang Kualitas Pelayanan Hukum

Koordinator : Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

Anggota : Kepala Seksi Intelijen Keimigrasian
 Kepala Seksi Penindakan Keimigrasian
 Afiyah Maghfiroh
 Luthfiana Nurani
 Yusnia Kurniasih
 Eka Laura Ferdianti
 Irllyana Sefty Lindiasari



Ditetapkan di Sidoarjo
 Pada tanggal 20 Juni 2019
 Kepala Kantor Imigrasi,

Barlian
 NIP. 19600209 198403 1 002

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SURABAYA**

NOTA DINAS
NOMOR W.15.IMI.IMI.UM.01.01-3222-1

Yth. : Tim Dokumen 6 Area Perubahan WBK
Dari : Kepala Kantor
Hal : Perubahan Susunan Anggota Tim dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 19 Juni 2019

Dalam rangka percepatan penyelesaian perbaikan dokumen data dukung WBK, maka perlu dilakukan perubahan susunan tim, bersama ini diminta kehadiran Saudara dalam rapat yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 20 Juni 2019
Pukul : 08.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Rapat Kepala Bagian Tata Usaha
Jalan Raya Juanda km 3-4 Sidoarjo
Agenda : Perubahan Susunan Anggota Tim dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Barlian
NIP. 19600209 198403 1 002

NOTULA

Hari : Kamis
Tanggal : 20 Juni 2019
Pukul : 08.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Kepala Bagian Tata Usaha

Peserta Rapat :

- 1) Habiburrahman, Kepala Bagian Tata Usaha
- 2) Andri Wahyono, Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum
- 3) Dinar Fitria Rushadi, Staf Nidang TPI
- 4) Yofi Dewa K., Staf Bagian Tata Usaha
- 5) Dwi Oktavia P., Staf Bagian Tata Usaha
- 6) Sarah Maulida, Staf Bidang Doklan
- 7) Yusnia Kurniasih, Staf Bidang TPI
- 8) M. Ridhoudin, Staf Bidang Doklan
- 9) Arinda Risky, Staf Bidang TPI
- 10) Hanisyah, Staf Bidang TPI
- 11) Putri Wijayanti, Staf Bidang Inteldak
- 12) Atika Faradina, Staf Bidang TIKIM
- 13) Dyah Retnani, Staf Bidang TIKIM

Agenda : Rapat Perubahan Susunan Anggota Tim Dalam Rangka
Pembangunan Zona Integritas menuju WBK

a. Jalannya Rapat:

Rapat dipimpin dan dibuka oleh Kepala Kantor, bahwa guna percepatan pemenuhan kelengkapan dokumen data dukung Lembar Kerja Evaluasi (LKE) sebagaimana yang termuat dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.OT.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019 perlu dilakukan perubahan/revisi anggota tim Surat Keputusan dalam rangka pembangunan zona integritas menuju WBK.

Latar belakang diadakan revisi adalah nama-nama yang tercantum dalam SK tidak sesuai dengan Bidang atau tugas fungsinya, oleh karenanya perlu dilakukan perbaikan dengan menempatkan anggota tim sesuai dengan Bidang. Setelah dilakukan pengecekan, terinventaris 6 Surat Keputusan yang perlu direvisi, antara lain:

1. Surat Keputusan tentang *Role Model*
2. Surat Keputusan tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
3. Surat Keputusan Unit Layanan Pengaduan
4. Surat Keputusan tentang Unit Pengendalian Pungutan Liar
5. Surat Keputusan tentang Unit Pengendalian Gratifikasi
6. Surat Keputusan tentang Tim Pembangunan ZI WBK

b. Hasil

Akan dilakukan perubahan SK Tim secara bertahap dengan penyesuaian tugas fungsi bidang masing-masing.

c. Kesimpulan

Perubahan SK Tim agar dilakukan segera bertahap.

d. Saran

Selanjutnya disampaikan arahan dari Pimpinan:

1. bahwa nama - nama yang ditunjuk segera disahkan dalam Surat Keputusan Kepala Kantor;
2. Agar nama-nama yang ditunjuk dalam SK Tim segera memenuhi tugas-tugas yang diminta dari pihak terkait;
3. diharapkan inisiatif dari pegawai guna kelancaran inventarisasi dokumen data dukung.

e. Penutup

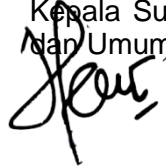
Demikian notula ini dibuat, atas perhatian dan arahan lebih lanjut kami ucapkan terima kasih.

Notulis



Dwi Oktavia Purwanti
NIP. 19871027 201012 2 001

Disahkan Oleh,
Kepala Subbagian Kepegawaian
dan Umum



Andri Wahyono
NIP. 19810909 200901 1 006

DOKUMENTASI VISUAL


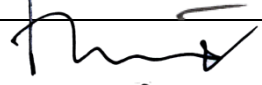
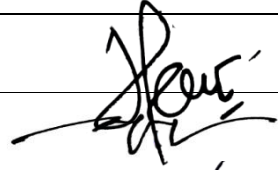
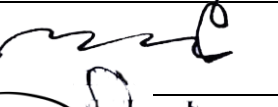
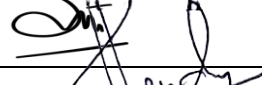


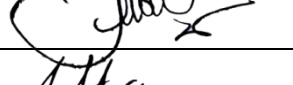
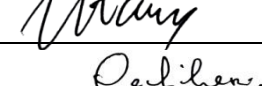

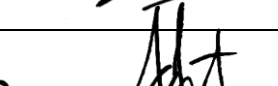
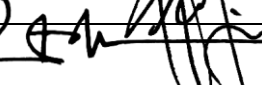
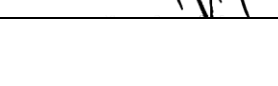





KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SURABAYA

DAFTAR HADIR RAPAT PERUBAHAN SUSUNAN ANGGOTA TIM DALAM RANGKA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)

HARI, TANGGAL : KAMIS, 20 JUNI 2019
TEMPAT : RUANG KEPALA BAGIAN TATA USAHA

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	BARLIAN	KEPALA KANTOR	
2.	HABIBURRAHMAN	KABAG TATA USAHA	
3.	ANDRI WAHYONO	KASUBAG WAI DAN UMUM	
4.	DINAR FITRI RUSHADI	STAF BIDANG TPI	
5.	YOFI DEWA K.	STAF BIDANG TATA USAHA	
6.	DWI OKTAVIA	STAF BIDANG TATA USAHA	
7.	SARAH MAULIDA	STAF BIDANG DOKLAN	
8.	YUSNIA KURNIASIH	STAF BIDANG TPI	
9.	M. RIDHOUDIN	STAF BIDANG DOKLAN	
10.	ARINDA RISKY P.	STAF BIDANG TPI	
11.	HANISYAH	STAF BIDANG TPI	
12.	PUTRI WIJAYANTI	STAF BIDANG INTELDAK	
13.	ATIKA FARADINA	STAF BIDANG TIKIM	
14.	DYAH RETNANI S.	STAF BIDANG TIKIM	
15.			



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SURABAYA
Jalan Raya Juanda km 3-4, Sedati - Sidoarjo, Jawa Timur
Telepon (031) 8690534, Fax. (031) 8690525

Laman: www.imigrasisurabaya.org Email: kanim_surabaya@imigrasi.go.id

BERITA ACARA
SELEKSI TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM
(TIM ZI WBK/WBBM)
KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SURABAYA

Pada hari ini Kamis tanggal 20 bulan Juni tahun 2019, guna pembentukan Tim ZI WBK/WBBM telah dilaksanakan penelitian terhadap nama-nama tersebut dibawah berdasarkan pertimbangan kompetensi, pemahaman tugas dan fungsi, dedikasi, tidak pernah melakukan tindak pidana serta pelanggaran kode etik dan kode perilaku dan dinyatakan memenuhi syarat. Anggota Tim dimaksud selanjutnya akan ditetapkan sebagai Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui Surat Keputusan Kepala Kantor.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ANGGOTA TIM

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Nanang Mustofa	Koordinator Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
2.	Ramdhani	Koordinator Bidang Penguatan Akuntabilitas Koordinator Bidang Persepsi Korupsi
3.	Tatang Suheryadin	Koordinator Bidang Penataan Tata Laksana
4.	Arief Hazairin Satoto	Koordinator Bidang Penguatan Pengawasan Koordinator Bidang Kualitas Pelayanan Hukum
5.	Habiburrahman	Koordinator Bidang Manajemen Perubahan Koordinator Bidang Penataan Manajemen SDM
6.	Tyas Kristaningrum	Anggota Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
7.	Ragil Putra Dewa	Anggota Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Anggota Bidang Persepsi Korupsi
8.	Aurizal Wendhyarta Hakim	Anggota Bidang Penguatan Akuntabilitas
9.	Angga Mahardika B. W.	Anggota Bidang Penguatan Akuntabilitas Anggota Bidang Persepsi Korupsi
10.	Mangatur Hadi Putra S.	Anggota Bidang Penataan Manajemen SDM Penguatan Pengawasan Anggota Bidang Persepsi Korupsi Anggota Bidang Kualitas Pelayanan Hukum
11.	Rendra Mauliansyah	Anggota Bidang Penguatan Pengawasan

		Anggota Bidang Kualitas Pelayanan Hukum
12.	Ruri Hariri Roesman	Anggota Bidang Penataan Tata Laksana
13.	Sasmita Aditya	Anggota Bidang Penataan Tata Laksana
14.	Kholilurrohman	Anggota Bidang Penataan Tata Laksana
15.	Yudhistira	Anggota Bidang Penataan Tata Laksana Anggota Bidang Perseps Korupsi
16.	Rini Noviasih	Anggota Bidang Manajemen Perubahan
17.	Andri Wahyono	Sekretaris
18.	Dwi Oktavia Purwanti	Anggota Bidang Manajemen Perubahan
19.	Yofi Dewa Kurniasari	Anggota Bidang Manajemen Perubahan
20.	Tri Indah Handayani	Anggota Bidang Manajemen Perubahan
21.	Dinar Fitria Rushadi	Anggota Bidang Penataan Tata Laksana
22.	Hanisyah Dauti Ichromi	Anggota Bidang Penataan Tata Laksana
23.	Novita Rahmawati Hidayat	Anggota Bidang Penataan Manajemen SDM
24.	Angga Rahadi Saputra	Anggota Bidang Penataan Manajemen SDM
25.	Anggari Budiarti	Anggota Bidang Penataan Manajemen SDM
26.	Yusfia Anggraini Haq	Anggota Bidang Penataan Manajemen SDM
27.	Sarah Maulida	Anggota Bidang Penguatan Akuntabilitas
28.	Mirwan Azhar Fahrudi	Anggota Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
29.	Aang Samsudy	Anggota Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
30.	Atika Faradina Randa	Anggota Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
31.	Dyah Retnani Sulistyaningrum	Anggota Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
32.	Arinda Risky Pramudita	Anggota Bidang Persepsi Korupsi
33.	Afiyah Maghfiroh	Anggota Bidang Kualitas Pelayanan Hukum
34.	Luthfiana Nurani	Anggota Bidang Kualitas Pelayanan Hukum
35.	Mohammad Ridhouddin Yunus	Anggota Bidang Persepsi Korupsi
36.	Rizal Rahmat Darmawan	Anggota Bidang Persepsi Korupsi
37.	Givanda Eka Hapsari	Anggota Bidang Penguatan Akuntabilitas
38.	Desinta Wahyu K.	Anggota Bidang Penataan Manajemen SDM Penguatan Pengawasan

39.	Putri Wijayanti	Anggota Bidang Penataan Manajemen SDM Penguatan Pengawasan
40.	Yusnia Kurniasih	Anggota Bidang Kualitas Pelayanan Hukum
41.	Eka Laura Ferdianti	Anggota Bidang Kualitas Pelayanan Hukum
42.	Irlyana Seftya Lindiasari	Anggota Bidang Kualitas Pelayanan Hukum

Disahkan oleh
Kepala Kantor,



Barkan
NIP. 19600209 198403 1 002